

**ANALISIS PROSEDUR PENGENDALIAN TERHADAP RESTITUSI
PPN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENGAMANAN PPN DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA
PULOGADUNG**

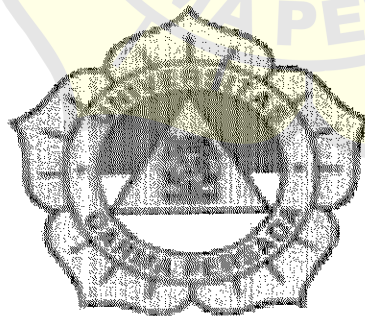
SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan
Program Studi Strata Satu (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Darma Persada**

Oleh:

Dherta Ardy Rian Widiasti

06420021



FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JAKARTA

2010

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dherta Ardy Rian Widiasti

NIM : 06420021

Jurusan : Akuntansi

Peminatan : Perpajakan

Judul Skripsi : **ANALISIS PROSEDUR PENGENDALIAN
TERHADAP RESTITUSI PPN DALAM RANGKA
MENINGKATKAN PENGAMANAN PPN DI
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
JAKARTA PULOGADUNG**

Telah diperiksa, dan disetujui untuk diajukan dan diujikan dalam sidang

Ujian Skripsi Sarjana tanggal 24 Agustus 2010

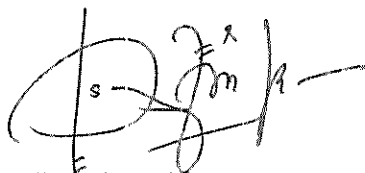
Jakarta, 21 Agustus 2010

Mengetahui,

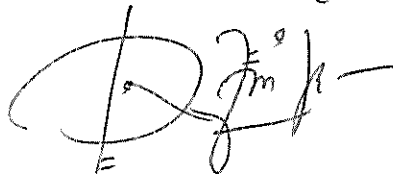
Menyetujui,

Ketua Jurusan Akuntansi

Dosen Pembimbing

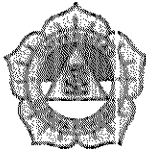


Atik Isnawati, SE.AK.Msi



Atik Isnawati, SE. Ak. Msi.

(H. Drs Sunarto Widodo, Ak. MM)



FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JURUSAN AKUNTANSI

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Yang Berjudul:

ANALISIS PROSEDUR PENGENDALIAN TERHADAP
RESTITUSI PPN DALAM RANGKA MENINGKATKAN
PENGAMANAN PPN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA JAKARTA PULOGADUNG

Telah Dipertahankan Dihadapan Sidang Tim Penguji Skripsi Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 24 Agustus 2010

Waktu : 09.00 WIB s/d selesai.

Oleh

Nama : Dherta Ardy Rian W

NIM : 06420021

PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1 Atik Isniawati, SE., Ak, Msi.	Ketua	
2 Muharamad Masdar. SE, Ak.	Anggota	
3 Dra. Sri Ari Wahyuningsih, Dra.MM.	Anggota	

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dherta Ardy Rian Widiasti

NIM : 06420021

Jurusan : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Skripsi sarjana yang berjudul “ Analisis Prosedur Pengendalian Terhadap Restitusi PPN dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung” merupakan skripsi yang saya susun di bawah bimbingan Bpk. Drs Drs.Sunarto Widodo, Ak.MM dimana seluruh isi yang ada merupakan hasil karya tulis yang menjadi tanggung jawab penulis.

Demikianlah pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Jakarta, Agustus 2010

Yang Menyatakan,

METERAI
TEMPEL
PEJABAT KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIC OF INDONESIA
E-233/AF200864921
6000 DJP
Dherta AKW

ABSTRAK

- (A) Dherta Ardy Rian Widiasti (06420021)
- (B) **Judul Skripsi:** Analisis Prosedur Pengendalian Terhadap Restitusi PPN dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan PPN di KPP Pratama Jakarta Pulogadung
xii ± 113 hal; 8 lampiran; daftar riwayat hidup; tahun 2010.
- (C) **Kata Kunci:** Analisis Prosedur Pengendalian Terhadap Restitusi PPN dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan PPN di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.
- (D) **Alasan dan Tujuan Penelitian:** Untuk mengetahui sampai seberapa jauh prosedur pengendalian terhadap Restitusi PPN dalam rangka meningkatkan penerimaan PPN, menganalisis kendala dan kelemahan yang terjadi di lapangan dan upaya yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Pulogadung dalam mengatasi kendala tersebut, serta mengetahui seberapa jauh SOP yang digunakan di KPP Pratama Jakarta Pulogadung dari struktur pengendalian dan prosedur intern.
- (E) **Metode Penelitian:** Sumber data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan observasi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metodologi keperustakaan (*library research*), metodologi lapangan dengan cara wawancara , observasi dan telaah data.
- (F) **Hasil Penelitian:** data yang diperoleh adalah secara umum data mengenai prosedur Intern Restitusi dengan mengacu pada Standard Operating Procedures dibagi dua yaitu Tata cara penyelesaian permohonan pengembalian pendahuluan PPN untuk Wajib Pajak criteria tertentu khusus Wajib Pajak Patuh dan Tata cara penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PPN untuk selain Wajib Pajak Patuh. Didalam SOP ini bisa menjadi pedoman KPP untuk menjalankan Restitusi. Prosedur pengendalian penerimaan Restitusi PPN di KPP Pratama Jakarta Pulogadung sudah terlaksana dengan baik dan telah diatur didalam UU No.6 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi UU No. 9 Tahun 1994. Mengetahui kendala-kendala prosedur intern pemberian restitusi PPN, serta kelemahan-kelemahan didalam pemeriksaan pajak, prosedur konfirmasi yang selalu ada di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.
- (G) **Kesimpulan dan Saran:**

Kesimpulan: Yang menjadi acuan dalam Prosedur Pengendalian terhadap Restitusi PPN di KPP Pratama Jakarta Pulogadung yaitu *Standard Operating Procedures*, dengan adanya SOP bisa mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh DJP walaupun sudah mengikuti SOP, adanya kelemahan Pemeriksa Pajak mewaspadaikan indikasi Wajib Pajak yang terlibat dalam faktur fiktif. Di dalam prosedur konfirmasi di KPP masih saja menunda-nunda konfirmasi ke Wajib Pajak jadi tidak tepat waktu yang seharusnya dalam 30 hari Wajib Pajak harus sudah menjawab panggilan Surat Pemberitahuan dan juga terjadi di prosedur atau sistem informasi perpajakan yang masih sebagian memakai secara manual dan tidak online dicomputer ini menyebabkan menghambat sistem klarifikasi Wajib Pajak.

Saran: Untuk mengantisipasi indikasi WP yang terlibat dalam penggunaan Faktur fiktif hendaknya dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat terhadap semua pihak yang terkait, baik dari aparat perpajakan sendiri maupun dari Wajib Pajak, serta pemeriksa pajak harus sepenuhnya melakukan pengujian analisa atas kebenaran Export dan Import, arus utang, arus piutang, dan kas atas penjualan dan pembelian dengan demikian setidaknya dapat mengurangi usaha-usaha manipulasi dengan terus meningkatkan langkah-langkah pengamanan di waktu-waktu mendatang. Hendaknya konfirmasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Pulogadung tidak mengulur-ulur waktu dan perlu adanya monitoring yang efektif dan adanya pantauan sehingga tidak ada Wajib Pajak tidak ada yang mengeluh tentang konfirmasi serta seluruh Prosedur atau Sistem Informasi Perpajakan harus sepenuhnya Online dicomputer agar proses klarifikasi Faktur yang menggunakan data base yang besar dapat dilakukan dengan lancar dan cepat.

(H) **Daftar Acuan:** Jumlah buku 13 (sebelas) buku (tahun 2002-2006).

(I) **Dosen Pembimbing:** Drs. Sunarto Widodo, Ak. MM

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang atas segala rahmat, berkat dan kasihnya, karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi dengan judul “Analisis Prosedur Pengendalian Terhadap Restitusi PPN dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan PPN Di KPP Pratama Jakarta Pulogadung”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh Ujian Sidang dan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Universitas Darma Persada Jakarta.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung baik moril maupun materil selama penulis menyelesaikan proses penulisan skripsi ini.

Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Untuk kedua orang tuaku Alm. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah membesarkan dengan kasih sayang, dan doa yang tidak mampu penulis balas walaupun dengan raga sekalipun dan yang telah memberikan semangat serta bantuan baik moril maupun materiil, serta adikku tercinta, Yanian Ruri Dwiastie. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan kebahagiaan “AMIN”.
2. Roci Sumbara yang selalu setia menemani penulis kemanapun selama penulis menyelesaikan skripsi ini, memberikan doa dan semangat bagi penulis. Mudah-mudahan hubungan ini untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik.
3. Ibu Atik Isniawati, SE.M.Si sebagai ketua jurusan Akuntansi Universitas Darma Persada yang telah memberikan persetujuan proposal skripsi ini, serta menjadi pembimbing yang telah bersedia mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs.Sunarto Widodo, Ak., MM. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tersedia meluangkan waktu, tenaganya untuk memberikan petunjuk, pengarahan, ide-ide dan bimbingannya kepada penulis dalam menyusun skripsi ini semua ajaran bapak sangat berarti bagi penulis. Selamat jalan pak, dedikasimu selalu diingat.

5. Bapak Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak., MM; Jombrik, SE, MM; Drs. Haryanto, Ak., MM; Muhammad Masdar, SE.,AK.MM; Ibu Dra. Sri Ari Wahyuningsih,SE. Msi; Bapak Iman Nugroho, SE.,Ak.MM; dan dosen pengajar lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Dan Bapak / Ibu staf Tata Usaha (TU) Fakultas Ekonomi Universitas Darma Persada yang telah mendidik, mengajarkan, dan memberikan informasi kepada penulis selama masih duduk di bangku kuliah.
6. Bapak Dwi Abri, Bapak Hapid, Bapak Roland, Kak Rian, Bapak Agus Wardhana, Ibu Yulda, Bapak Masno, Bobby, Herman, serta seluruh karyawan dan karyawan KPP Pratama Jakarta Pulogadung yang telah meluangkan waktu dan membantu penulis untuk memberikan informasi dan data yang dibutuhkan.
7. Dina Farichin, Atika Wardani, dan kak Teguh Nugroho yang senantiasa mengkoordinasikan jadwal bimbingan dan dengan ikhlas membantu penulis dalam banyak hal selama proses pembuatan skripsi.
8. Sahabat-sahabatku tercinta Ririn, Preti, Heni, Wayan, Herni, Restian Putri,Reko S, Rismawati, Ida, Yayan, Ruri, Daniel O, yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.

9. Teman-teman angkatan 2006, adik, kakak di Universitas Darma Persada di luar kampus yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan semangat sehingga terselesaikannya skripsi ini.

Tiada yang dapat penulis persembahkan kepada semua pihak yang bersangkutan, selain doa semoga amalnya mendapat balasan dari Allah SWT. Usaha maksimal telah penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

Jakarta, 02 Agustus 2010

Dherta A.R.W

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

ABSTRAK..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL..... x

DAFTAR GAMBAR..... xi

DAFTAR LAMPIRAN..... xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan..... 1

1.2 Perumusan Masalah..... 4

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 5

1.3.1.Tujuan Penelitian..... 5

1.3.2.Manfaat Penelitian..... 6

1.4 Kerangka pemikiran..... 7

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pajak.....	11
2.1.1.Pengertian Pajak.....	11
2.1.2.Fungsi Pajak.....	13
2.1.3.Azas Pengenaan Pajak.....	15
2.1.4.Dasar Pungutan Pajak.....	20
2.1.5.Hambatan Pungutan Pajak.....	21
2.2 Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	22
2.2.1.Pengertian PPN.....	22
2.2.2.Dasar Hukum PPN.....	23
2.2.3.Subjek PPN.....	25
2.2.4.Objek PPN.....	27
2.2.5.Tarif PPN.....	29
2.3 Restitusi PPN.....	29
2.3.1.Pengertian Restitusi.....	29
2.3.2.Kelebihan dan Kekurangan PPN.....	30
2.3.3.Sebab-sebab Terjadinya Restitusi Pajak.....	32
2.4 Pengertian Internal.....	38
2.4.1.Pengertian Internal.....	38
2.4.2.Tujuan Pengendalian Internal.....	38
2.4.3.Komponen Pengendalian Internal.....	39
2.5 Prosedur Pengendalian Restitusi.....	40

2.5.1.Dasar Hukum Kebijakan Restitusi PPN.....	40
2.5.2.Prosedur Restitusi.....	42

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian.....	48
3.2 Operasional Variabel.....	48
3.2.1. Variabel Bebas.....	49
3.2.2. Variabel Terikat.....	49
3.3 Objek Penelitian.....	49
3.4 Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan data.....	49
3.4.1. Jenis Data.....	49
3.4.2. Sumber Data.....	50
3.4.3. Metode Pengumpulan Data.....	51
3.4.4. Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.5 Variabel dan Pengukurannya.....	53
3.5.1. Pajak Masukan.....	53
3.5.2. Pajak Keluaran.....	53
3.5.3. Faktur Pajak.....	53
3.5.4. Tarif PPN.....	53
3.5.5. Sistem Pengendalian Intern.....	54
3.6 metode Analisis Data.....	54
3.6.1. Metode Analisis Kualitatif.....	54

3.6.2. Metode Analisis Kuantitatif.....	55
---	----

BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN

4.1 Sejarah KPP Pratama Jakarta Pulogadung.....	56
4.1.1. Visi dan Misi.....	58
4.1.2. Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Pulogadung.....	59
4.2 Pedoman Prosedur Pengendalian Intern Restitusi PPN Di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.....	63
4.2.1. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengembalian Pendahuluan PPN untuk WP kriteria Tertentu Khusus WP Patuh.....	63
4.2.2. Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN untuk selain WP Patuh.....	82
4.3 Pelaksanaan Prosedur Pengendalian Intern Restitusi PPN di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.....	88
4.3.1. Prosedur Kerja Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengembalian Pendahuluan PPN untuk WP criteria tertentu Khusus WP Patuh.....	88
1) Prosedur Kerja.....	86
2) Jangka Waktu Penyelesaian.....	91

3) Bagan Arus (Alur FlowCart).....	92
4.3.2. Prosedur Kerja Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPN untuk Selain WP Patuh.....	93
1) Prosedur Kerja.....	93
2) Jangka Waktu Penyelesaian.....	94
3) Bagan Arus (Alur Flowcart).....	96
4.4 Kendala dan Kelemahan Prosedur Pengendalian Intern Pemberian Restitusi PPN di KPP Pratama Jakarta Pulogadung.....	97
4.4.1.Pengendalian Internal.....	97
4.4.2.Kendala dan Kelemahan Prosedur Pengendalian Intern Pemberian Restitusi PPN.....	98
4.5 Jumlah Permohonan Restitusi PPN dari Tahun 2007-2009.....	99
4.6 Jumlah Restitusi yang Disetujui dan tidak disetujui dari tahun 2007-2009.....	102
4.7 Jumlah Penerimaan PPN dari tahun 2007-2009.....	109
4.8 Kelemahan Restitusi PPN (Pajak Pertamabahan Nilai).....	113

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....114

5.2 Saran.....116

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

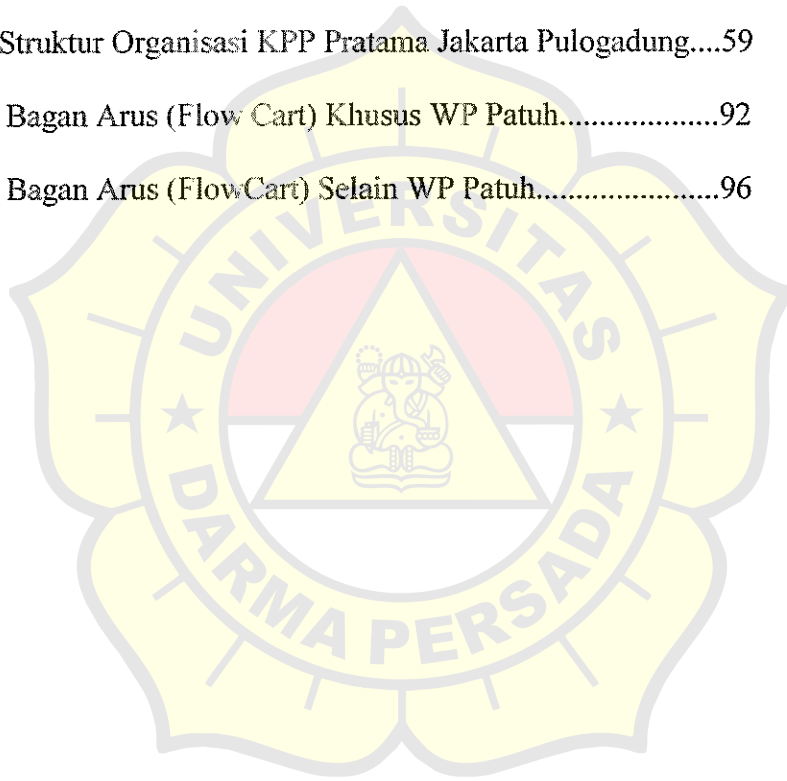


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Jumlah Permohonan Restitusi PPN Tahun 2007.....	99
Tabel 2 Jumlah Permohonan Restitusi PPN Tahun 2008.....	100
Tabel 3 Jumlah Permohonan Restitusi PPN Tahun 2009.....	101
Tabel 4 Jumlah Restitusi yang Disetujui Tahun 2007.....	102
Tabel 5 Jumlah Restitusi yang Tidak Disetujui Tahun 2007.....	104
Tabel 6 Jumlah Restitusi yang Disetujui Tahun 2008.....	105
Tabel 7 Jumlah yang Tidak Disetujui Tahun 2008.....	106
Tabel 8 Jumlah Restitusi yang Disetujui Tahun 2009.....	107
Tabel 9 Jumlah yang Tidak Disetujui Tahun 2009.....	108
Tabel 10 Jumlah Penerimaan Restitusi PPN Tahun 2007.....	109
Tabel 11 Jumlah Penerimaan Restitusi PPN Tahun 2008.....	110
Tabel 12 Jumlah Penerimaan Restitusi PPN Tahun 2009.....	111

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.4 Kerangka Pemikiran.....	9
Gambar 2.5 Mekanisme Prosedur Restitusi.....	45
Gambar 4.1.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Pulogadung....	59
Gambar 4.3.1 Bagan Arus (Flow Cart) Khusus WP Patuh.....	92
Gambar 4.3.2 Bagan Arus (FlowCart) Selain WP Patuh.....	96



DAFTAR LAMPIRAN

- I Lembar Kegiatan Penyusunan Skripsi
- II Surat Keterangan Pemberian Ijin Magang dari Direktorat Jenderal Pajak
- III Surat Keterangan telah Melakukan Praktek Kerja Lapangan / Magang di KPP Pratama Jakarta Pulogadung
- IV Absensi Magang di KPP Pratama Jakarta Pulogadung
- V Formulir SPT Masa PPN 1107
- VI Formulir SPT Masa PPN 1108
- VII Surat Setoran Pajak
- VIII Faktur Pajak Standar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ada dua sumber penerimaan APBN dalam negeri, yaitu penerimaan perpajakan atau penerimaan non migas, dan penerimaan migas. Peranan penerimaan pajak dalam negeri ini merupakan sumber yang sangat dominan. Untuk meningkatkan penerimaan negara dari berbagai sumber terutama diluar minyak dan gas bumi, maka pengembangan perangkat fiscal yang meliputi perpajakan dilaksanakan berdasarkan azas keadilan dan pemerataan dengan meningkatkan peran pajak langsung sehingga mampu berfungsi sebagai alat untuk menunjang pembangunan pemerataan kesejahteraan rakyat dengan ditunjang oleh pelaksanaan system dan prosedur perpajakan untuk meningkatkan pendapatan negara terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan azas keadilan dan pemerataan manfaat dan kemampuan. Dalam hubungan itu kesadaran masyarakat untuk membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab terus ditingkatkan melalui motivasi, penerangan, penyuluhan, pendidikan sejak dini. Adanya perbedaan interpretasi peraturan antara Wajib Pajak dengan petugas pajak sangat menghambat proses restitusi dan berpotensi merugikan Wajib Pajak maupun negara. Setiap KPP mempunyai persepsi yang sama dalam menjabarkan Kep. Dirjen pajak No.754/PJ/2001. Atas dasar itulah, maka

Wajib Pajak dituntut untuk memenuhi kewajiban tersebut dengan melaksanakan secara luas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan khususnya Undang-undang PPN ini.

Restitusi adalah hak Wajib Pajak untuk meminta kelebihan pajak yang telah dibayar, mekanisme inilah seringkali dimanfaatkan untuk mencuri uang negara yang otomatis merugikan keuangan negara, jalannya perekonomian atau mengganggu data makro atau data statistik, Wajib Pajak sebenarnya tidak pernah membayar pajak (lebih bayar) akan tetapi mereka mengaku seakan-akan telah terjadi kelebihan pembayaran karena ada faktur pajak fiktif dan meminta pengembaliannya.

Modus operasi manipulasi restitusi PPN dan faktur pajak fiktif telah merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar. Untuk itu peranan dari aparat perpajakan khususnya dari Kantor Pelayanan Pajak sebagai ujung tombak dari penerimaan ini sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini, sehingga perwujudan masyarakat adil dan makmur yang merata akan cepat terealisasi dan dalam limit waktu yang Indonesia akan betul – betul menjadi negara yang mapan dengan kondisi ekonomi yang kuat, sesuai dengan yang diharapkan. Sehubungan hal tersebut jadi jika dalam suatu masa, Pajak Masukan dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran. Digambarkan pada pertengahan tahun 1999-2000 terjadi manipulasi restitusi dimana terjadi penyimpangan dalam pengelolaan restitusi pajak sebesar Rp.2,05 triliun atau 21,60% dari total Rp.9,5 triliun

yang diperiksa dalam periode 1999 dan 2000. Audit restitusi pajak, yang bersifat parsial tersebut, dilakukan terhadap 70% dari total restitusi nasional pada tahun 1999 dan 2000. Dari total restitusi sebesar Rp.9,4 triliun, yang dikeluarkan pada tahun 1999 maka yang diaudit oleh BPK sebesar Rp.4,9 triliun. Sementara total pada tahun 2000 yang sebesar Rp.7,8 triliun diperiksa Rp 4,6 triliun. Berdasarkan data Ditjen Pajak waktu itu, nilai restitusi seluruh jenis pajak pada tahun 1999/2000 mencapai Rp.9,67 triliun, pada tahun 2000 menjadi Rp.8,48 triliun (sembilan bulan) dan tahun 2001 menjadi Rp.12,09 triliun. Menurut hasil audit BPK tersebut, pemeriksaan terhadap pelaksanaan restitusi dilakukan terhadap 35 Kantor Pelayanan Pajak dari total 140 KPP di seluruh Indonesia. Penyimpangan Rp.2 triliun muncul akibat tidak adanya bukti-bukti pendukung yang mampu ditunjukkan oleh KPP. Tidak adanya data pendukung itu membuat BPK menyimpulkan pembayaran restitusi tidak sesuai aturan.

Peranan pajak meliputi Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Masuk, Cukai, Pajak Ekspor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan penerimaan pajak lainnya. Dari berbagai jenis pajak tersebut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan bagian terbesar dan penerimaan pajak. Dimana prinsip-prinsipnya telah diatur dalam undang-undang Drijen Pajak, pembahasan tidak dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan khusus PPN yang mengatur bidang-bidang usaha tertentu.

dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan khusus PPN yang mengatur bidang-bidang usaha tertentu.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dilihat dari permasalahan seperti implementasi restitusi PPN dikaitkan dengan ketentuan perundangan yang berlaku, faktor-faktor yang menghambat implementasi restitusi PPN, sehingga dapat merugikan Wajib Pajak maupun penerimaan negara, dan sistem pengolahan restitusi PPN masih berpotensi munculnya yang dilakukan Wajib Pajak maupun petugas pajak, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan bagian terbesar dan penerimaan pajak di daerah DKI Jakarta. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Analisis Prosedur Pengendalian Terhadap Restitusi PPN dalam Rangka Meningkatkan Pengamanan PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung"**.

1.2 Perumusan Masalah

Untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur, maka pembangunan harus terus dilaksanakan dan guna memacu pembangunan diperlukan suatu dana yang besar, untuk itu perlu adanya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dalam bentuk membayar pajak dengan tepat dan benar.

Nasional menerapkan system *Self Assesment*, yaitu kepada Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggung jawab yang besar untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan kewajiban pajaknya. Dari uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka timbul beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana kriteria pedoman pengendalian intern restitusi PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung ?
2. Bagaimana pelaksanaan prosedur pengendalian intern restitusi PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung ?
3. Bagaimana kendala dan kelemahan prosedur pengendalian intern pemberian restitusi PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah memberikan informasi tentang :

1. Mengetahui sampai seberapa jauh prosedur pengendalian penerimaan dan restitusi PPN yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung dari tahap perencanaan penerimaan sampai tahap pengendalian pengembalian kelebihan bayar.

2. Mengetahui sampai seberapa jauh tingkat keandalan dari struktur pengendalian intern yang dilakukan di dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung.
3. Mengetahui bagaimana peranan prosedur pengendalian intern dalam membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung dalam mengawasi Wajib Pajak untuk menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak dan memberikan restitusi pajaknya serta kelemahan-kelemahan restitusi.

Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti dijabarkan sebagai berikut :

a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Bagi pihak KPP Pratama Jakarta Pulogadung, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam prosedur penerimaan pajak PPN yang mempunyai tingkat pengendalian yang memadai.

b. Bagi Pembaca

Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai metode dan prosedur yang ada di KPP Pratama Jakarta Pulogadung sehingga diharapkan dapat menambah serta

lebih memperjelas lagi tentang aktivitas KPP khususnya aktivitas penerimaan dan restitusi PPN, dengan demikian dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

c. Bagi Penulis

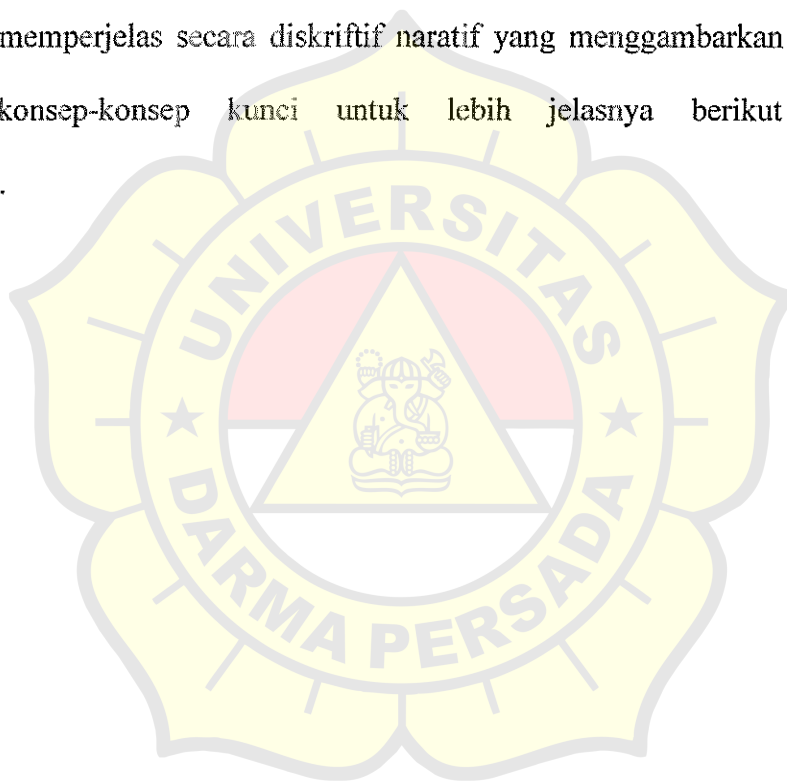
Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memberikan informasi dalam bidang perpajakan khususnya dalam hal penerimaan dan restitusi PPN di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung dan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir sarjana (program S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Darma Persada.

1.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian ini dibuat untuk dapat memperjelas secara deskriptif naratif yang menggambarkan keterkaitan konsep-konsep kunci, yang secara integral ” potret” (manifestasi) dari fokus permasalahan. Penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan dalam negeri, khususnya PPN merupakan sumber pendapatan negara yang diharapkan mampu menambah keuangan negara. Mengingat begitu besar peranan dari pajak ini sebagai sumber penerimaan negara perlu terus ditingkatkan, baik melalui intensifikasi pemungutan pajak ataupun ekstensifikasi Wajib Pajak, maka selayaknya KPP melengkapi dengan prosedur pengendalian

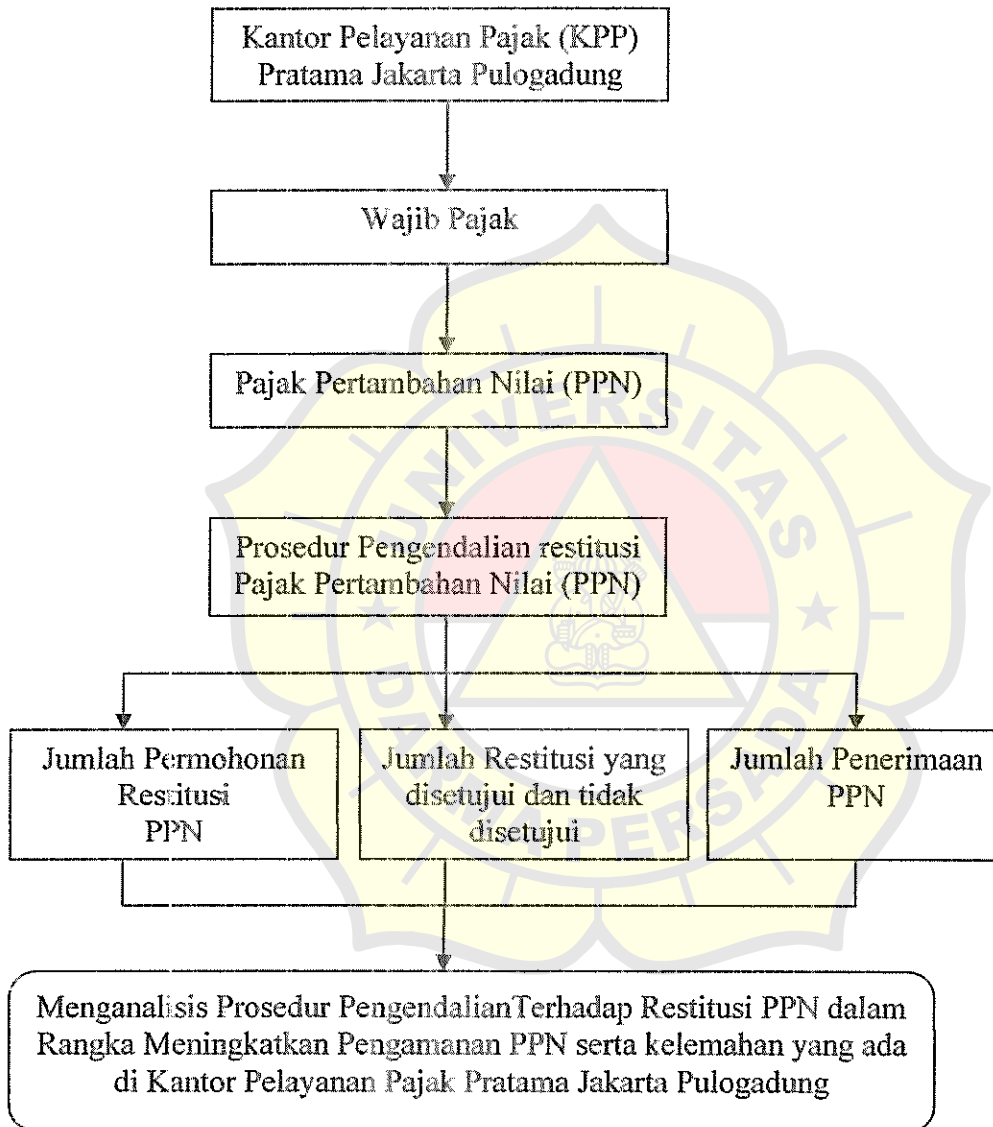
intern yang baik memungkinkan KPP mampu mengawasi dan melindungi penerimaan dan restitusi dari PPN.

Baik Wajib Pajak maupun KPP menyatakan pengajuan restitusi PPN relatif mudah yaitu dengan pengajuan dilakukan dengan mengisi SPT Masa PPN atau dengan surat tersendiri. bahwa kerangka penelitian ini dibuat untuk memperjelas secara diskriptif naratif yang menggambarkan keterkaitan konsep-konsep kunci untuk lebih jelasnya berikut penjelasannya.



Gambar 1.4

Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung, yang diolah oleh penulis.

Berdasarkan gambar di atas, dasar pemikiran penulis dalam membahas skripsi ini adalah diperolehnya data yang penulis peroleh dari tempat magang penulis yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung.

Dalam KPP Pratama Jakarta Pulogadung, terdapat Wajib Pajak Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang membayar pajaknya. Setelah itu penulis mempelajari data yang didapat dan menganalisis data dan informasi yang berkaitan dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang didalamnya termasuk tentang jumlah permohonan Restitusi PPN, jumlah Restitusi yang disetujui dan tidak disetujui dan jumlah penerimaan PPN.

Setelah penulis memperoleh data tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maka penulis mempersempit penelitian dengan mencari dan menganalisis prosedur pengendalian restitusi PPN.

Dalam hal ini penulis akan menyajikan jumlah permohonan restitusi, jumlah restitusi yang disetujui dan tidak disetujui dan jumlah pengamanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta meneliti kelemahan yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung.